



# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO TA. 2025

2025



**SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO**

JL. SUROYO NO. 27 TELP. (0335) 421445

**PROBOLINGGO 67211**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kota Probolinggo terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Probolinggo, selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

Probolinggo, Januari 2026  
Sekretaris DPRD Kota Probolinggo



**Drs. Teguh Bagus S., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606051990031015

## Lampiran – lampiran

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

#### **1.1.2 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

4. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Wali Kota Probolinggo.

### **1.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

### **1.2.1 Kedudukan Organisasi**

- Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah tanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah.

### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo No 4 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat DPRD maka :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
  - d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
2. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor dan kehumasan;
  - b. Penyiapan data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan proses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - d. Pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur kerja di lingkup sekretariat DPRD;
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan serta rumah tangga, protokol dan kehumasan;
  - f. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta sekretariat DPRD;
  - g. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekretariat DPRD;
  - h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub-Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur kerja sekretariat DPRD;
- d. Melaksanakan urusan surat-menyurat yang diperlukan oleh DPRD;

- e. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat DPRD;
  - f. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai di lingkup Sekretariat DPRD;
  - g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - h. Melaksanakan kegiatan tata kearsipan;
  - i. Rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
  - j. Memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - k. Menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD;
  - l. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
  - m. Menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers dan penyiapan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait;
  - n. Melaksanakan pengelolaan, penyajian dan pelayanan informasi;
  - o. Menyediakan pelayanan informasi melalui website DPRD/Sekretariat DPRD;
  - p. Mengoordinasikan pelaksanaan keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol; dan
  - r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan di bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan anggaran;
  - b. Pengolahan program dan rencana anggaran kegiatan sekretariat DPRD;
  - c. Perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan sekretariat DPRD;
  - d. Pengelolaan administrasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan sekretariat DPRD;

- e. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya di lingkungan sekretariat DPRD;
  - f. Pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan keuangan;
  - g. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD;
  - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
  - j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah, rapat, risalah, penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan verifikasi penyusunan Naskah Akademik;
  - b. Pengoordinasian bahan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
  - c. Pelaksanaan verifikasi bahan penyiapan Draft Peraturan Daerah Inisiatif;
  - d. Pelaksanaan verifikasi bahan pembahasan Peraturan Daerah;
  - e. Pelaksanaan verifikasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - f. Pelaksanaan verifikasi data atau bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - g. Pengevaluasian rumusan dalam rangka pengawasan;
  - h. Pengevaluasian bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM);
  - i. Pengoordinasian program dan jadwal rapat dan sidang;
  - j. Pengoordinasian pembahasan KUA PPAS dan APBD/APBDP;
  - k. Pengoordinasian pembahasan Peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan;
  - l. Pelaksanaan evaluasi rumusan dapat dalam rangka pengawasan;
  - m. Pelaksanaan evaluasi bahan rapat internal DPRD;
  - n. Pelaksanaan verifikasi bahan dalam penegakkan kode etik DPRD;
  - o. Pelaksanaan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - p. Pengevaluasian bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

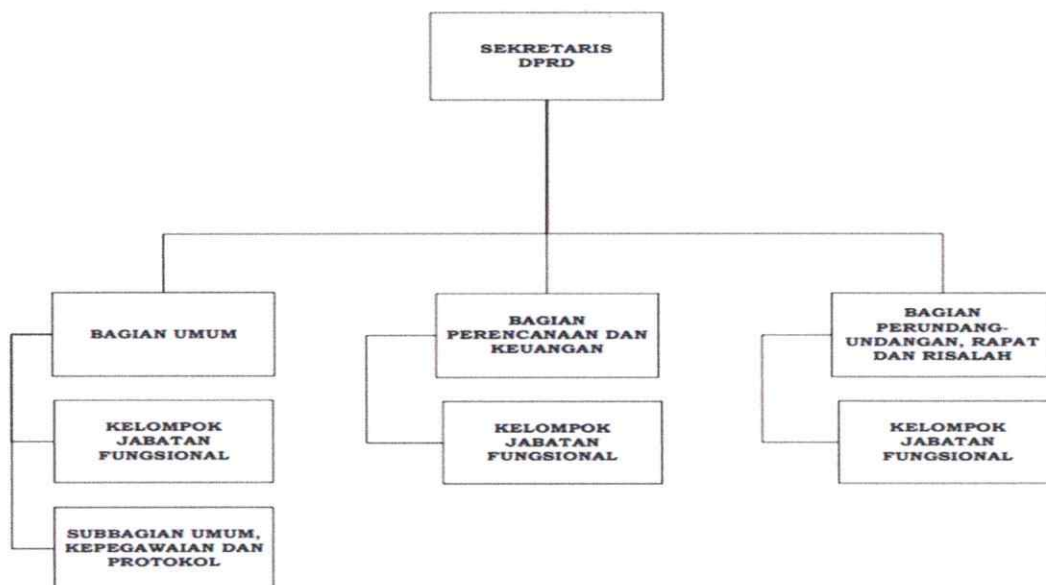
- q. Pengekoordinasian kegiatan hearing atau dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- r. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- s. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

## **GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO**

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo adalah sebagaimana gambar berikut:

### **1.3 Sumber Daya Organisasi**

#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia



Dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ditunjang oleh sumber daya perangkat daerah yang mencakup baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung lainnya. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan administratif dan fasilitatif terhadap DPRD, komposisi status SDM yang ada pada Sekretariat DPRD dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel : Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum	22	4
3	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	3
4	Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah	12	5
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>12</b>

*Sumber data: Subbag Umum, Kepegawaian dan Protokol per 31 Desember 2025*

### **1.3.1. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH SEKRETARAT DPRD**

- a. Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah Aturan yang multi tafsir terkait Perjalanan Dinas Dewan yang dapat menjadi masalah dalam proses penentuan keberlangsungan dari kegiatan DPRD.
- b. Lama perjalanan dinas terkait kunjungan kerja yang berkaitan dengan Lokus / Tempat tujuan dan lama kunjungan kerja. Ada tempat tujuan karena dengan adanya TOL bisa dipangkas lama perjalanan dan tidak perlu menginap dalam waktu yang lama.
- c. Kegiatan rapat yang bersamaan dengan perjalanan dinas (terkait makanan dan minuman rapat) dan perlu adanya satu pintu terkait fasilitasi makan minum rapat DPRD.
- d. Penggunaan 30% anggaran untuk Perjalanan Dinas yang dikarenakan tidak ada aturan yang jelas secara rinci terkait penggunaan 30%.
- e. Pokok pikiran (Pokir) Dewan belum diukur sejauh mana perannya dalam memfasilitasi dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab.
- f. Proses pengawasan kinerja Dewan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis (renstra) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Visi dari Walikota Probolinggo pada periode 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD yaitu :

**“MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF”.**

Terjemahan dari visi tersebut terdapat 5 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Penjelasan dari 5 kata kunci tersebut diterjemahkan sebagai misi Kota Probolinggo, sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan;
2. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan;
3. Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital;
4. Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan; dan
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan visi dan misi yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dapat diambil beberapa poin penting yang dapat membantu pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut hasil telaahan dari visi dan misi sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh DPRD dan Kepala Daerah merupakan dasar hukum dalam menjalankan proses pemerintahan.
- 2) Anggaran Daerah ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah merupakan instrumen untuk mewujudkan pembangunan daerah.

- 3) Pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- 4) Anggaran Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga Sekretariat DPRD dapat mendorong peran yang melekat dalam legislatif.

Setelah visi dan misi tersebut diterjemahkan, maka dapat ditentukan 1 tujuan yang relevan dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik."

Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan **SASARAN** yaitu "Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi."

### **2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditetapkan dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, adapun strateginya adalah :

1. Penataan kelembagaan dan tata kelola internal Sekretariat DPRD
2. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan budaya kerja ASN
3. Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja
4. Digitalisasi layanan administrasi dan persidangan DPRD
5. Penguatan peran Sekretariat dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik internal
7. Evaluasi dan optimalisasi sistem manajemen kinerja dan pelayanan
8. Penguatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil (outcome-based)
9. Pendalaman reformasi birokrasi internal dan penilaian mandiri RB
10. Inovasi pelayanan administratif berbasis teknologi
11. Konsolidasi capaian kinerja dan keberlanjutan program strategis
12. Optimalisasi dukungan terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah

Penyusunan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 diselaraskan secara langsung dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Penguatan Sinergitas peran Lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi

Dalam perumusannya, arah kebijakan dari Perangkat daerah, khususnya Sekretariat DPRD dalam mempertimbangkan secara menyeluruh potensi, peluang, tantangan, dan kendala yang mungkin muncul selama periode perencanaan, disusunlah arah kebijakan dari sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sekretariat DPRD
- b. Peningkatan kualitas kinerja sekretariat DPRD

Dengan arah kebijakan ini, strategi yang dirumuskan dapat diarahkan secara sistematis guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85,07	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	
			Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	72,62	73,02	73,41	73,81	74,21	74,61	75,00	

Pada Sekretariat DPRD, dimana Programnya yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (rutin) Untuk tahun 2025 ada 2 program, 17 kegiatan, 65 sub kegiatan. Adapun program kegiatan dan pagu anggaran sebagaimana pada tabel 2.4

**Tabel**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN 2025**

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	PAGU ANGGARAN (P.APBD)
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
<b>SEKERTARIAT DPRD</b>					<b>47.146.474.878</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>30.460.082.507</b>
<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>111.100.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	54.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	57.100.000
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>517</b>	<b>5.049.554.972,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	504	504	4.845.786.404
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	42.510.182
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	161.258.386

<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000,00</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	50.000.000
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>160.200.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	36	43.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	36	36	117.000.000
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>986.968.800</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	373.530.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	94.997.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	27.600.000
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Di sediakan	Paket	2	2	40.580.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di Sediakan	Dokumen	1	0	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	64.134.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	175.052.800
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	30.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	12	12	181.075.000
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>3.514.781.000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	2.724.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	115.532.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	45	45	664.781.000
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>1.958.849.820</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	53.761.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan.	Laporan	12	12	323.847.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	576.791.120

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.004.450.200
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	236	<b>1.186.981.100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	148.521.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	235.619.900
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	40.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	45	253.187.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	751.771.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	163	163	259.651.800
<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	177	<b>16.807.023.815</b>

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	30	30	16.342.023.815
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	120	120	375.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	27	90.000.000
<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>132.852.000</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	30	30	1.800.000
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	12	49.512.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	81.540.000
<b>PROGAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	<b>78.80</b>	<b>78,08</b>	<b>16.686.392.171</b>
<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>	<b>Presentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.829.671.243</b>

Penyusunan dan pembahasan Progam Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	3	3	47.705.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	5	5	1.394.341.243
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan	Dokumen	3	3	81.000.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang di Fasilitasi	Dokumen	3	3	281.950.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	24.675.000
<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	<b>Presentase Kebijakan Anggaran yang Dibahas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>327.301.638</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	124.826.676
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	32.987.500
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	58.527.500
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	74.350.000

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	56.120.000
<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>398.537.800</b>
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	12	61.315.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12	60.750.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	60.750.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	41.350.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1		92.787.300
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	

<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	<b>Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang di Fasilitas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>287</b>	<b>2.236.912.000</b>
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	180	180	1.565.612.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	3	100.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	6	216.000.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	49.000.000
Penyusunan Progam Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	6.300.000
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	90	96	300.000.000
<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>Presentase Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.458.074.500</b>
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	30	30	33.825.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	90	90	1.424.249.500
<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>	<b>Presentase Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>3.225.000</b>
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1	3.225.000

Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	0
<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	<b>Presentase Tugas DPRD yang Difasilitasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>498</b>	<b>10.293.372.780</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	400	474	10.253.232.780
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	12	14.040.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	12	26.100.000

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Probolinggo. Anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp 47.146.474.678,00 anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dengan besaran anggaran **Rp .43.129.922.678,00**
2. Belanja modal dengan besar anggaran sebesar **Rp. 4.016.552.000,00**

Diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGO**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPRD	78,80
2	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	73,02

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Rp. 30.460.082.507,00	APBD
2	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 16.686.392.171,00	APBD
		<b>Rp. 47.146.474.678,00</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan realisasinya.

**3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

**Tabel 3.1.**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai tugas dan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	78,80	86,99	110%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	73,02	76,71	105%

Bahwa untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD pada tahun 2025 capaiannya adalah 110% dengan target 78,80 terealisasi 86,99. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang targetnya 74 dengan realisasi 85,07 (115%) untuk Predikat B

Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD capaiannya adalah 105% dengan target 73,02 dengan realisasi 76,71 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang targetnya 72,36 dengan realisasi 72,62 predikat BB.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan  
akhir periode Renstra  
tabel 3.2**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target RENSTRA-PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	86,99						100					
2	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	73,02	73,41	73,81	74,21	74,61	75	76,71						100					

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Tabel 3.3**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	78,80	86,99	110%	Rp. 30.460.082.507	Rp. 28.677.608.631	94%
Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	73,02	76,71	105%	Rp. 16.686.392.000	Rp. 15.609.900.509	94%

**Tabel. 3.4  
Efisien Penggunaan Sumberdaya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROSENTASE CAPAIAN KINERJA	PROSENTASE CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai tugas dan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	110%	94%	110%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	105%	94%	105%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja dari masing-masing sasaran strategis.

**Tabel 3.5**

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>ANALISA PENYEBAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	78,80	86,99	
Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	73.02	76,71	

Faktor penunjang keberhasilan peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

**1. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD**

Capaiannya menjadi lebih baik / meningkat antara lain karena adanya evaluasi dan perbaikan dari capaian kinerja sebelumnya dengan menindaklanjuti rekomendasi dan harapan dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun sebelumnya. Adapun tindaklanjut dari perbaikan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo diantaranya adalah :

- adanya perbaikan dan peremajaan sarana dan prasarana yang terkait dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi rapat dan persidangan antara lain peremajaan sound system, pengadaan alat perekam audio maupun video serta perbaikan sarana telekomunikasi dengan peningkatan fasilitasi WiFi pada tiap-tiap ruang/
- Pada pelayanan fasilitasi pembahasan peraturan daerah maupun Naskah Akademik terkait pembentukan rancangan peraturan daerah telah disiapkan anggaran dalam hal penyediaan tenaga ahli fraksi maupun tim ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan.

- Pemenuhan hak keuangan DPRD telah ditindak lanjuti perbaikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik pada saat perencanaan dengan cara selalu berkoordinasi dan menginformasikan terkait perkembangan perencanaan penganggaran maupun dengan instansi terkait. Layanan pemenuhan hak keuangan DPRD antara lain pemenuhan gaji dan tunjangan DPRD yang meliputi tunjangan komunikasi, perumahan, transportasi serta pakaian dinas DPRD beserta atributnya. Untuk kegiatan rutin pendukung tugas dan fungsi DPRD terkait pemenuhan anggaran kebutuhan tugas dan fungsi DPRD telah dilakukan mulai tahap proses perencanaan diantaranya perhitungan maksimal terkait pemenuhan anggaran koordinasi dan konsultasi DPRD. Sedangkan rekomendasi terkait percepatan pencairan uang perjalanan dinas DPRD telah ditindaklanjuti dengan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan mencari solusi berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja dalam mencapai IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD antara lain:

- Peremajaan sarana dan prasarana yang sudah baik kurang ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang rutin sehingga sarana dan prasarana yang sudah bagus tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan secara maksimal
- Penyediaan tenaga ahli fraksi, penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan rapat pembahasan semestinya diperhatikan agar kegiatan terlaksana dengan baik dan terstruktur pelaksanaannya
- Sistem Pengelolaan dan Penatausahaan yang selalu up to date tidak diikuti dengan personil yang up to date pula sehingga sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan kompetensi pelaksana yang berkesinambungan,

## **2. IKU Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD**

Capaiannya meningkat karena Sekretariat DPRD telah berusaha meningkatkan kinerja mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatusahaan keuangan, pelaporan dan akuntabilitas kinerja dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo tahun 2025 sebesar Rp. 47.146.474.678,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp **44,287,509,140.00** Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai mana pada table di bawah:

**Tabel 3.2.1**

**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	43.129.922.678,00	40.430.768.587,00	93%
2	Belanja Modal	4.016.552.000,00	3.856.740.553,00	96%

**Tabel 3.2.2**

**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025**

PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%
<b>TOTAL APBD</b>		<b>47,146,474,678.00</b>	<b>44,287,509,140.00</b>	<b>94%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		<b>30,460,082,507.00</b>	<b>28,677,608,631.00</b>	<b>94%</b>
	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>111.100.000,00</b>	102,059,077.00	92%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.000.000,00	50,978,527.00	94%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	57.100.000,00	51,080,550.00	89%
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>5.049.554.972,00</b>	4,764,383,733.00	94%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.845.786.404,00	4,561,963,298.00	94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.510.182,00	41,964,835.00	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	161.258.386,00	160,455,600.00	100%
	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	34,643,100.00	69%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	34,643,100.00	69%
	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>160.200.000,00</b>	136,700,000.00	85%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.200.000,00	43,200,000.00	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	117.000.000,00	93,500,000.00	80%
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>986.968.800,00</b>	961,527,439.00	97%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.530.000,00	368,568,140.00	99%

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.997.000,00	93,978,970.00	99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.600.000,00	26,734,043.00	97%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	40.580.000,00	37,851,000.00	93%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.134.000,00	64,130,020.00	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.052.800,00	174,507,785.00	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000,00	29,899,999.00	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	181.075.000,00	165,857,482.00	92%
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	3.514.781.000,00	3,416,686,603.00	97%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,734,468,000.00	2,647,568,000.00	97%
	Pengadaan Mebel	115.532.000,00	111,587,009.00	97%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	664.781.000,00	657,531,594.00	99%
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.958.849.820,00</b>	1,895,691,093.00	97%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.761.000,00	50,918,614.00	95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.847.500,00	318,857,914.00	98%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.791.120,00	554,663,133.00	96%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.004.450.200,00	971,251,432.00	97%
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1,688,752,100.00</b>	<b>1,585,529,239.00</b>	<b>94%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.521.900,00	136,886,351.00	92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.619.900,00	211,581,504.00	90%
	Pemeliharaan Mebel	40.000.000,00	39,999,987.00	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.187.500,00	251,933,823.00	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	751.771.000,00	688,016,650.00	92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	259.651.800,00	257,110,924.00	99%

	Bangunan Lainnya			
	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>16.807.023.815,00</b>	15,647,828,619.00	93%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.342.023.815,00	15,242,556,943.00	93%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	375.000.000,00	373,783,176.00	100%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	31,488,500.00	35%
	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	<b>132.852.000,00</b>	132,559,728.00	100%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.800.000,00	1,530,000.00	85%
	Fasilitasi Fraksi DPRD	49.512.000,00	49,504,728.00	100%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	81.540.000,00	81,525,000.00	100%
	<b>PROGAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>16.686.392.171,00</b>	15,609,900,509.00	94%
	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>	<b>1.829.671.243,00</b>	1,415,120,181.00	77%
	Penyusunan dan pembahasan Progam Pembentukan Peraturan Daerah	47.705.000,00	-	0%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.394.341.243,00	1,074,118,592.00	77%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	81.000.000,00	42,740,000.00	53%

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	281.950.000,00	273,936,487.00	97%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	24.675.000,00	24,325,102.00	99%
	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	<b>346.541.676,00</b>	331,288,770.00	96%
	Pembahasan KUA dan PPAS	124.826.676,00	123,139,170.00	99%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	32.987.500,00	30,601,800.00	93%
	Pembahasan APBD	58.257.500,00	53,853,000.00	92%
	Pembahasan APBD Perubahan	74.350.000,00	72,369,600.00	97%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	56.120.000,00	51,325,200.00	91%
	<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>398.537.800,00</b>	382,633,735.00	96%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	61.315.000,00	61,169,250.00	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60.750.000,00	60,705,000.00	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60.750.000,00	60,615,000.00	100%
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	41.350.000,00	40,225,000.00	97%

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	92.787.300,00	79,923,000.00	86%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	81.585.500,00	79,996,485.00	98%
	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	<b>2.236.912.000,00</b>	2,138,783,583.00	96%
	Pendalaman Tugas DPRD	1.565.612.000,00	1,528,761,433.00	98%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.000.000,00	94,422,150.00	94%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000,00	216,000,000.00	100%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	49.000.000,00	-	0%
	Penyusunan Progam Kerja DPRD	6.300.000,00	-	0%
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	300.000.000,00	299,600,000.00	100%
	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>1.458.074.500,00</b>	933,081,374.00	64%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	33.825.000,00	23,349,000.00	69%
	Pelaksanaan Reses	1.424.249.500,00	909,732,374.00	64%
	<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>	<b>4.285.000,00</b>	3,225,000.00	75%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	3.250.000,00	3,225,000.00	99%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.035.000,00	-	0%
	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	<b>10.412.369.952,00</b>	10,405,767,866.00	100%

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.371.869.952,00	10,365,627,866.00	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14.175.000,00	14,040,000.00	99%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	26.325.000,00	26,100,000.00	99%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Probolinggo sehingga dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan perencanaan tahun ke depannya.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 94%

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel. Oleh karena itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo.

LKjIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029 namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan dapat lebih memahami tentang rencana strategis selama 5 (lima) tahun ke depan serta pengembangannya di masa yang akan datang serta mendorong perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan dalam pencapaian kinerja utama terutama dalam pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.2 Landasan Hukum .....	1
1.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Kedudukan Organisasi.....	2
1.2.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Sumber Daya Organisasi.....	6
1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis .....	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	21
BAB IV PENUTUP .....	33